

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI



**OLEH
A. FADLI ABU
NIM 105711105716**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN

**KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh

**A.FADLI ABU
NIM : 105711105716**

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Takdir terbaik adalah apa yang kamu miliki dan
Hadiah terbaik adalah apa yang sedang kamu jalani,
Tetap hidup syukuri dan nikmati

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur akhirnya Karya Ilmiah yang berjudul
“Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Makassar” ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibu dan terima kasih atas
semua doa restu dan dukungan baik moral maupun spiritual sehingga
skripsi ini dapat terselesaikan.



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Fadli Abu
Stambuk : 105711105716
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Judul Skripsi : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



A. Fadli Abu
NIM: 105711105716

Diketahui Oleh:



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Asdar, SE., M.Si
NBM: 1286 845



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: A. Fadli Abu, Nim: 105711105716 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/60201/091004/2023 M, Tanggal 14 shafar 1445 H /31 Agustus 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Manajemen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Shafar 1445 H
31 Agustus 2023 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H Andi Jma'an. S.E., M.Si
2. Asdar, S.E., M.Si
3. A. Nur Fitrianti, S.E., M.Si
4. Warda, S.E., M.E

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411)866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar
Nama Mahasiswa : A. Fadli Abu
No.Stambuk/ NIM :105711105716
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi :Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia Penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Agustus 2023 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.
NBM: 651 507

Pembimbing II

Asdar, SE., M.Si
NIDN: 0903039102

Mengetahui,

Dekan



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si.
NBM:651 507

Ketua Program Studi

Asdar, SE., M.Si
NBM: 1266 845

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Fadli Abu
NIM : 105721114719
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Nonexclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kota Makassar**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



A. Fadli Abu
NIM 105711105716

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis almarhum bapak Baharuddin dan ibu Halija yang senantiasa memberi dukungan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini, serta kawan-kawanku yang tak kenal lelah untuk memberi dukungan dan semangat untuk penulis agar pencapaian tercapai. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr.H.Andi Jam'an, SE., MS.i, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Asdar, SE., M.,Si, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr.H, Andi Jam'an ., SE., M.,Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi dapat diselesaikan.
5. Bapak Asdar,.SE.,M.,Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih untuk semua kerabat, sahabat yang telah memberikan arahan dan banyak membantu untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Terima kasih untuk teman-teman kelas EP.16 B yang selalu belajar bersama dan memberikan dukungan.
10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2016 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fisabilil Haq fastabiqul khairat, Wassalamualikum Wr.Wb

Makassar, 29 Maret 2023

A.FADLI ABU



ABSTRAK

A.FADLI ABU, Tahun 2023 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar, Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I H. Andi Jam'an dan Pembimbing II Asdar

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Data Yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data target dan realisasi pajak reklame pada tahun 2013-2023 serta data primer yaitu data yang di ambil dari hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini dengan analisis deskriptif menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame di Kota Makassar masih kurang optimal. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013-2023 yang rata-ratanya hanya mencapai 2,72% atau menurut kriteria sangat kurang, yang di akibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak serta adanya peraturan walikota Makassar tentang pemasangan reklame yang tidak lagi boleh dilakukan di jalan-jalan nasional sehingga menjadikan penerimaan pajak reklame menjadi berkurang.

Kata Kunci: Pajak Reklame, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

A.FADLI ABU, Year 2023 Contribution of Advertising Tax to Regional Original Income for the City of Makassar, Thesis for the Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I H. Andi Jam'an and Advisor II Asdar

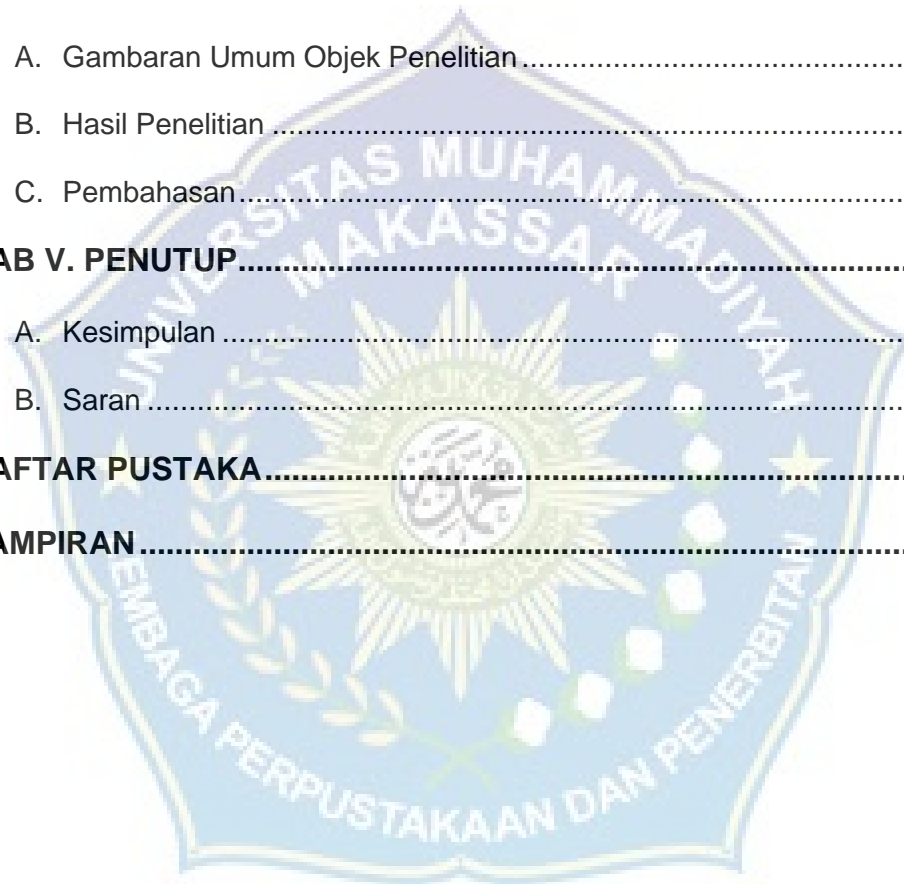
This study aims to determine how big the contribution of advertising tax is to local revenue in the city of Makassar. The type of research used in this research is to use a qualitative approach in which the research is descriptive in nature. The data used in this study is quantitative, namely target data and realization of advertisement tax in 2013-2023 as well as primary data, namely data taken from interviews. The results of this study with descriptive analysis show that advertisement tax revenue in Makassar City is still not optimal. This can be seen from the contribution of advertisement tax to Regional Original Income in 2013-2023 which averaged only 2.72% or according to very low criteria, which was caused by a lack of public awareness in paying taxes and the Makassar mayor's regulation regarding the installation of advertisements that are no longer allowed to be carried out on national roads so as to reduce advertisement tax revenue.

Keywords: Advertising Tax, Contribution, Local Own Revenue

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACK</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Teori	7
B. Tinjauan Empiris	18
C. Kerangka Konsep.....	22
D. Hipotesis	23
BAB III. METODE PENELITIAN.....	24

A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Jenis Dan Sumber Data	24
D. Metode Analisis	23
E. Definisi Operasional	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	28
B. Hasil Penelitian	33
C. Pembahasan	44
BAB V. PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	53



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3.1 Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah.....	26
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar Berdasarkan Jumlah Kecamatan.....	32
Tabel 4.2 Target Dan Realisasi Pajak Reklame.....	34
Tabel 4.3 Persentase Kontribusi Jenis Pajak Daerah.....	38
Tabel 4.4 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	23
Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Makassar	32
Gambar 4.2 Alur Pelayanan Pajak Reklame.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target Dan Realisasi Reklame.....	61
Lampiran 2 Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame	62
Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Penelitian	63
Lampiran 4 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	65
Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan atau mengadakan perubahan-perubahan kearah keadaan yg lebih baik. Pembangunan yang ingin dicapai bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata dan mencerdaskan bangsa baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Demi tercapainya pembangunan nasional, maka penyusunan program pembangunan tersebut mengikuti suatu pola atau tatanan yang telah ditentukan didalam pemerintah negara Indonesia.

Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya, baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengesalkan arti perandari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Pembagian daerah Indonesia yang terdiri dari daerah besar dengan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang maka berdasarkan hal tersebut dilaksanakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Realisasi dari kedua asas tersebut maka di negara kita ada pemerintahan daerah yang bersifat administratif dan bersifat otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas daerah tertentu, berwenang mengatur

aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang No.Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah). Dalam menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri faktor sumber pendapatan daerah sangat menentukan terlaksananya pembangunan di daerah.

Untuk meningkatkan dan menetapkan peyelenggara pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah secara merata, maka dilakukan pendayagunaan aparatur pemerintah daerah yang pelaksanaan dan pengamanannya juga diperlukan adanya pengawasan yang efektif dan efisien agar pembangunan nasional berjalan dengan baik. Pendayagunaan aparatur pemerintah sangat penting dalam pengelolaan pendapatan daerah untuk menggali sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah.

Dalam membiayai pembangunan salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dari sektor pajak dan retribusi, meskipun tidak kalah pentingnya pemasukan dari berbagai sektor pendapatan yang lain.

M.Farouq S (018) dalam bukunya yang berjudul Hukum Pajak di Indonesia, mengatakan bahwa hukum pajak merupakan salah satu alat legitimasi dan instrumen kebijakan yang digunakan negara untuk menghimpun dana pajak yang dipergunakan untuk menyelenggarakan jalannya roda pemerintahan dan membiayai pembangunan. Bagi negara yang memungut pajak sesuai syarat dan ketentuan, ruang lingkup dan batasan, tata cara dan prosedur administrasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar terus dilakukan

mengingat dikota Makassar merupakan kota yang mempunyai laju pertumbuhan sangat tinggi dimana kegiatan perekonomian dan pemerintahan terpusat dikota tersebut. Terpusatnya segala kegiatan di kota makassar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dikota tersebut yang lebih maju dibandingkan daerah-daerah yang ada di sekitarnya seperti gowa dan maros hal itu dapat ditunjukkan oleh banyaknya industri dan perdagangan yang ada dikota Makassar. Meningkatnya perdagangan dan industri di kota Makassar, sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Makassar menjadikan penulis tertarik untuk meneliti.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan cara peningkatan terhadap sumber daya yang sudah ada, dalam hal ini adalah pajak daerah. Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro,003).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 009 dalam pasal 1 ayat (6) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak reklame adalah pajak tentang penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media atau bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Dari berbagai jenis-jenis pajak yang dipungut oleh kota makassar, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD. Makassar merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat dari berbagai sektor khususnya pembangunan industri dan properti serta perdagangan yang begitu pesat persaingan di bidang properti di Kota Makassar.

Melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karna setiap perusahaan ataupun perorangan akan banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis usaha dan produk mereka. Hal ini juga bisa dilihat dari berbagai sudut kota Makassar baik di pusat kota maupun di pinggiran kota banyak terpasang berbagai macam jenis reklame.

Jika dilihat peningkatan pajak reklame dari tahun ke tahun realisasinya terjadi peningkatan yang signifikan, peningkatan yg paling signifikan terjadi pada tahun 017 yang terealisasi Rp. 3.8.115.16 dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp18.354.864.487 terjadi peningkatan antara tahun 016-017 sekitar 114%.

Masalah umum yang dihadapi pada sektor pajak reklame ini adalah kurangnya kesadaran atau pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan peran masyarakat dalam meningkatkan pajak reklame ini, disebabkan kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada masyarakat tentang pajak reklame, selain itu juga kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu contohnya banyaknya reklame yang tanpa mempunyai ijin pemasangan dari

pemerintah kota ataupun reklame yang perijinannya sudah mati. Disisi lain, kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari tahun ketahun untuk menambah PAD agar tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah disektor keuangan akan dapat terwujud. Melihat keadaan yang terjadi sebaiknya potensi pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu ditingkatkan lagi, antar lain dengan mencari obyek-obyek reklame baru yang dapat dikenakan pajak reklame, yang dimana obyek-obyek yang pada waktu lalu tidak dikenakan pajak. Dari pihak Bapenda dan pemerintah daerah kota makassar harus memberikan penerangan pengawasan dan denda terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis memilih judul **“Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”**

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian adalah seberapa besar Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan untuk penelitian ini adalah kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati

masalah Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang pajak reklame dimasa otonomi daerah.

- b. Memperoleh pengetahuan tentang potensi pajak reklame, serta berbagai hal tentang Pajak di Kota Makassar.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Memberi informasi kepada pemerintah daerah Kota Makassar dalam rangka peningkatan pajak reklame.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 004 berisikan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana perimbangan pendapatan lain-lain.

Berdasarkan undang-undang pasal 37 No.106 Tahun 1948, undang-undang ini mengenai keuangan daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari:

- a. Pajak daerah dan retribusi
- b. Pendapatan hasil perusahaan daerah
- c. Pajak negara yang diserahkan pada daerah (seperti, subsidi, penjualan atau penyewaan barang-barang milik negara).

Berikut ini beberapa uraian tentang pendapatan daerah:

1. Pajak Daerah

Seperti apa yang telah kita pelajari bahwa pajak daerah merupakan sumber dana yang penting didalam pembangunan daerah, dibawah ini penulis ingin menjelaskan tentang pengertian dari pajak daerah secara umum.

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah tersebut. Yang dimaksud daerah disini adalah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonom), dan di Indonesia daerah yang berhak memungut pajak dibagi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Untuk dapat membiyai dan memajukan daerah tersebut.

Mardiasmo (004:98) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Artinya, bahwa hasil pajak daerah yang dipungut dari orang pribadi atau badan tidak seimbang dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah, dimana terdapat aturan yang mengikat antara kebijakan dan kepentingan pemerintah dalam mengelola pajak tersebut.

Rochmat Soemitro (003) pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Suandy (005:36) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah dan pembangunan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh

pemerintah daerah dibentuk oleh daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah dan untuk menambah penghasilan daerah.

Dari beberapa rumusan pengertian yang di uraikan diatas, dapatlah dirumuskan suatu batasan pengertian berkenaan dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah untuk membiayai rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Dari defenisi tersebut diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak daerah adalah merupakan sumber dana yang wajib di pungut oleh daerah berdasarkan Undang-undang untuk kepentingan pendanaan dan pembiayaan daerah. Pajak daerah yang dilakukan pemungutannya di kota Makassar sesuai undang-undang peraturan daerah BAB IV pasal 4 adalah:

- a. Pajak hotel
- b. Pajak restoran
- c. Pajak hiburan
- d. Pajak reklame
- e. Pajak penerangan jalan
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g. Pajak parkir
- h. Pajak air tanah
- i. Pajak sarang burung walet
- j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
- k. Perolehan hak atas tanah dan bangunan.

1. Retribusi Daerah

Retribusi merupakan salah satu sumber jenis pungutan pemerintah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pengertian retribusi adalah: hasil pungutan daerah sebagai balas jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa, pekerjaan, pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah yang dilaksanakan dengan peraturan daerah yang didasarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pengertian retribusi menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah "Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan".

Kebijaksanaan memungut bayaran untuk barang yang disediakan oleh pemerintah berpangkal pada efisiensi ekonomi. Dalam artian seseorang bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya.

2. Fungsi Pajak

Pemerintah memungut pajak semata-mata untuk memperoleh uang atau dana. Dana tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin pemerintah dan biaya pembangunan. Pada umumnya, dikenal dua macam fungsi pajak yang utama bagi pemerintah antara lain:

a. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah

untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial, ekonomi maupun politik dan hukum dengan tujuan tertentu. Fungsi ini disebut fungsi tambahan dari pajak karena fungsi ini merupakan pelengkap dari fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgeter. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. misalnya penurunan pajak ekspor dapat mendorong peningkatan produksi bagi pengusaha yang bergerak di sektor ekspor sehingga kemampuan kerja bertambah, mendorong meningkatnya pendapatan luar negeri.

3. Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak, dapat dibagi dalam beberapa bagian. Akan tetapi, dalam hal ini penekanannya dititik beratkan pada jenis-jenis pajak yang ada di daerah, untuk terlebih dahulu penulis mengemukakan pembagian pajak antara lain

a. Menurut Golongannya

1) Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang di maksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya. Jadi pajak jenis ini tidak bisa di limpahkan kepada pihak lain. Contohnya : pajak penghasilan, yang disingkat PPh. PPh tidak bisa dilimpahkan atau digeser kepada

orang/pihak lain untuk menanggungnya, wajib pajak harus memikul sendiri pajak itu walaupun pembayarannya bisa melalui pihak lain.

2) Pajak tidak langsung

Adalah pajak yang dimaksudkan dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain atau pemikul. Contoh pemikul pajak tidak langsung adalah konsumen. atau sebaliknya dari pembeli kepada penjual.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi pribadi wajib pajak. Misalnya : pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pajak penghasilan bila wajib pajaknya orang pribadi,

2) Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja. Misalnya: Bea materai, PPN, Pajak perseroan, PPh badan. Dalam Bea materai pemungutannya tidak memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak misalnya : sudah kawin atau belum.

4. Pengertian Reklame dan Pajak Reklame

Berbagai penulis telah berusaha untuk menyatakan dengan kata-kata, tetapi hakekat reklame adalah demikian kompleks, dimana Reklame ialah benda, alat atau perbuatan, yang menurut bentuk susunan dan/atau corak ragamnya dengan maksud untuk mencari keuntungan. Dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau

didengar dari sesuatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame itu sendiri.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pajak reklame merupakan salah satu pajak yang menurut golongannya tergolong dalam pajak langsung. Maka pengertian reklame adalah pajak daerah yang dapat dipaksakan dan ditujukan secara atau wajib pajak menurut peraturan atau Undang-undang dengan mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan secara perorangan atau suatu perusahaan. Pada hakikatnya pajak reklame merupakan pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah yang telah berlaku dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah daerah kota makassar.

Dari uraian diatas, maka pemungutan pajak reklame adalah setiap kegiatan yang menarik atau memungut pajak daerah sebagai salah satu manfaat lokasi dengan kebendaan yang ada diatasnya sebesar yang ditentukan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, dan didasarkan Undang-undang yang berlaku.

a. Macam-macam Reklame

Dalam Peraturan daerah BAB V pasal 19 ayat (3) Menurut jenisnya, Reklame dapat dibagi dalam beberapa jenis yaitu:

1. Reklame vidiotron/megatron

Yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan alat elektronik audio visual berupa pesawat pemancar yang menampilkan beberapa gambar atau naskah reklame.

2. Reklame Kain

Reklame ini adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis. Reklame kain contohnya yaitu umbul-umbul, Reklame Melekat.

3. Reklame Selebara

Reklame ini berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.

4. Reklame Berjalan

Yaitu reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

5. Reklame Kendaraan

Reklame kendaraan adalah yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga lain yang perusahaan dan perwakilannya berdomisili di Reklame. Reklame ini menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Ini digunakan pada saat insidentil saja misalnya launching produk.

6. Reklame Suara

Jenis reklame ini diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau yang ditimbulkan dari atau penggunaan alat atau pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali di gunakan wajib pajak maupun biro reklame.

7. Reklame *Filmatauslide*

Reklame ini diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

8. Reklame Spanduk

Spanduk merupakan reklame yang memuat data reklame komersial ataupun non komersial yang terbuat secara ringkas, padat serta jelas memakai kain serta sejenisnya yang dibentangkan diantara dua tiang ditempat strategis serta ramai.

9. Reklame Papan atau Billboard

Billboard merupakan tipe reklame yang berisi foto atau tulisan yang menarik serta informatif dengan dimensi besar, ditempatkan pada atap bilik pertokoan atau lembaga tertentu dan biasa juga dipinggiran jalan raya dengan sifat permanen.

10. Reklame T-Banner dan X-Banner

Banner merupakan tipe reklame dengan wujud kotak (*potrait*) dan persegi panjang umumnya dicetak dengan digital printing memakai MMT di tempatkan depan toko ataupun lembaga penyangga.

11. Reklame Baliho

Reklame jenis ini berisikan foto atau tulisan menarik serta informatif dengan dimensi besar, ditempatkan ditempat universal serta strategis memakai tiang serta kokoh dan bertabiat semi permanen.

b. Syarat-syarat Reklame

Jenis reklame pada prasarana kota, penempatan dan pemasangannya menggunakan atau terletak pada prasarana kota, persyaratan sebagai berikut:

1. Pemasangan tidak mengganggu ketertiban umum dan keamanan serta tidak menyimpang dari norma-norma sosial dan budaya, tidak mengganggu keindahan kota, tidak mengganggu lalu lintas pejalan kaki maupun pengaturan lalu lintas.
2. Tidak mengganggu fungsi prasarana kota dan merusak konstruksi prasarana kota, kebersihan kota.
3. Pemasangan pada daerah milik perorangan dapat pula diperkenankan bila mendapatkan persetujuan tertulis dari pemiliknya. Demikian pula pemasangan reklame pada daerah tata pengairan,
4. Dana dan beberapa jalan di kota Makassar yang dilarang adanya pemasangan reklame dengan jenis tertentu, yaitu; jenis reklame baliho, X-Banner, T-Banner, eklame jenis tersebut yaitu; Jl.Ahmad Yani, Jl.Jendral Sudirman, dan Jalan Nasional lainnya.

c. Fungsi Reklame

Semua aktivitas yang menyebabkan dicapainya barang-barang dan jasa-jasa oleh para konsumen dari para produsen dapat dinyatakan sebagai distribusi, dan reklame merupakan bagian didalamnya. Tanpa reklame maka aneka macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau industri tidak akan tercapai hasil atau target yang diharapkan, jadi reklame menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan

dan memperkenalkan produk produsen ke konsumen baik itu barang dan jasa. Reklame dapat memenuhi fungsi ekonomi oleh karena reklame:

1. Membantu memberikan penerangan kepada pihak konsumen.
2. Membantu memperbesar produksi hingga meratakan jalan untuk produksi dalam jumlah besar.
3. Memperbesar kecepatan perputaran dalam bidang perniagaan eceran dan dengan demikian menurunkan biaya-biaya distribusi persatuan produk.
4. Memperkenalkan barang dan jasa, serta seseorang. Sehingga dapat dan mudah dikenal oleh pengguna jalan dan orang banyak

d. Pencabutan Izin Reklame

Izin penyelenggaraan dapat dicabut bila:

- 1) Reklame tersebut menurut pertimbangan gubernur kepala daerah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan, dan kesehatan.
- 2) Jika permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana telah ditetapkan, yaitu terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan yang diizinkan.
- 3) Tidak ada label atau izin dan stempel penerbitan dari dinas pendapatan daerah kota makassar.
- 4) Penyelenggara reklame tidak melakukan kewajiban seperti menempelkan pending, memelihara benda-benda dan alat-alat yang digunakan untuk reklame, membongkar reklame beserta bangunan konstruksi setelah berakhirnya izin atau izin dicabut dan menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan

reklame itu menimbulkan kerugian pada pihak lain.

4. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 004 dalam pasal 1 ayat (18) tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai pengeluaran rutin. Jadi, dapat dikatakan bahwa PAD sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya sehingga dapat mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam hal sumber penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah, Undang-undang No. 3 Tahun 014 pasal 85 ayat (1) tentang Pemerintah Daerah telah menetapkan sumber pendapatan daerah terdiri atas.

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, meliputi: hasil penjualan kekayaan daerah yang

tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

B. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu merupakan salah satu bahan yang dimana penelitian ini dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian tentang pajak reklame telah beberapa kali dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang berbeda pula.

Beberapa penelitian ini hanya digunakan sebagai referensi bahan kajian.

Berikut penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

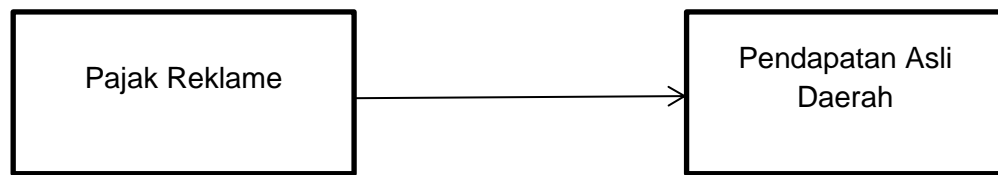
No	Peneliti/tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Firiani/01	Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada dinas pendapatan daerah	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian ini dipandang sesuai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak reklame pada PAD di kabupaten Pontianak terus mengalami perubahan. Dilihat dari tahun 2009-2011. Pada tahun 2009 pajak reklame memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,84%, kemudian tahun 2010 sebesar 0,79% dan pada tahun 2011 sebesar 1,01%.
.2	Purnamawati/017	Kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batang Hari	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.	Persentase hasil penelitian ini rata-rata perkembangan PAD tahun 2011-2015 sebesar 8.81%, kemudian pajak daerah dengan rata-rata sebesar 33.45%, dan pajak reklame selama periode 2011-2015 dengan

				rata-rata sebesar 11.73% dan diantara penerimaan daerah tertinggi rata-ratanya terletak pada Pajak Daerah. Dan kontribusi pajak reklame terhadap PAD=kab. Batanghari selama periode2011-2015 dengan rata-rata sebesar 5.77%.
3.	Winda Raufiana Dewi/016	Kontribusi pajak hotel dan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Tingkat efektifitas penerimaan pajak hotel dalam waktu empat tahun terakhir dari tahun 2011-2014 sebesar 106,90%, 109,81%, 15,37%, dan
4.	Vera Fransiscapesik/013	asli daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota manado	Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame di kota manado adalah peraturan daerah, kebijakan pemerintah, reklame rokok dan minuman alkohol, reklame vidiotron, reklame yang diadakan pemerintah dll
5.	Ike Runtini/017	Efektifitas Pajak parkir dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota kediri 2014-2016	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	menunjukkan bahwa secara parsial pajak parkir dan reklame berpengaruh positif terhadap PAD.
6.	Sulistionngsih Dan Farida Idayat/013	Kontribusi Pajak reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) kota Surabaya	Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengelolaan pajak reklame di kota surabaya masih kurang optimal. Bisa dilihat kontribusi pajak reklame terhadap PAD tahun 2008-2011 rata-rata hanya mencapai 7,45% atau dalam kriteria sangat kurang.

C. Kerangka Konsep

Pajak merupakan wujud tanggung jawab warga negara dalam pembangunan dan merupakan imbalan tidak langsung dari pemerintah yang diberikan kepada warga negara. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah. Upaya pemerintah dalam meningkatkan pajak daerah salah satunya dapat dilakukan dengan mengefektifkan sektor pendapatan pajak reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial bagi pajak daerah sehingga dalam pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Dalam menghitung kontribusi pajak reklame, terlebih dahulu akan diperbandingkan antara jumlah realisasi penerimaan pajak reklame yang telah ada dengan jumlah target penerimaan pajak reklame yang telah ditetapkan. Apabila realisasi penerimaan pajak reklame lebih besar dari target yang ditetapkan berarti pajak reklame memiliki potensi yang cukup besar dan dapat dikatakan pajak reklame tersebut telah efektif. sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak daerah dan PAD. Berikut gambarannya:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah di duga pajak reklame memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar .



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap keadaan yang terjadi tentang besarnya kontribusi yang diberikan pajak reklame dalam upaya membantu meningkatkan PAD kota makassar.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi tempat penelitian yang direncanakan peneliti yaitu kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang merupakan lembaga resmi yang menaungi penerimaan pajak khusus Kota Makassar yang berlokasi di Jln.Urip Sumoharjo dan waktu penelitian yang dilakukan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Kuantitatif yaitu jumlah data yang terkumpul selama proses penelitian yang tertuang dalam bentuk angka-angka
2. Data Kualitatif yaitu jumlah data yang di kumpulkan dari artikel-artikel yang berisikan aturan-aturan, yang datanya dalam bentuk tulisan Sedangkan sumber data-data penelitian ini adalah:
 - a) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dalam lembaga tersebut yaitu berupa bukti target dan realisasi penerimaan pajak reklame.
 - b) Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak terkait, dengan wawancara.

1. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data-data yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian yang berasal dari arsip-arsip yang dimiliki oleh perusahaan atau responden yang dianggap signifikan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Yaitu kegiatan tanya jawab kepada pihak terkait, khususnya pimpinan atau pegawai yang terkait langsung dalam perpajakan.

D. Metode Analisis Data

Guna membuktikan hipotesis kerja yang diajukan penulis menggunakan:

1. Analisis deskriptif, berfungsi untuk mendeskripsikan dan untuk memberi gambaran terhadap tingkat penerimaan pajak reklame dengan menggunakan angka perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak reklame dan menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur. Dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

2. Analisis kontribusi, Menurut kamus ekonomi (T. Guritno, 199:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian diartikan sebagai sumbangsi yang diberikan pendapatan pajak reklame terhadap besarnya pendapatan asli daerah kota makassar. Kontribusi penerimaan pajak reklame dapat

Untuk menggambarkan indikator dalam menilai kontribusi pajak reklame terhadap PAD, maka digunakan indikator pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0%-10%	SangatKurang
10%-0%	Kurang
0%-30%	Sedang
30%-40%	CukupBaik
40%-50%	Baik
Diatas 50%	SangatBaik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM,1991 (dalam Handoko:013)

E. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan satu variabel independen. Adapun definisi operasional setiap variabel adalah sebagaiberikut:

- a. Pajak reklame yaitu semakin meningkatnya perekonomian kabupatenatau. kota maka pemasukan pemerintah daerah dari sektor pajak daerah juga meningkat, tidak terkecuali pajak reklame. Pajak reklame dianggap alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, karena dianggap mampu menarik calon konsumen dan reklame dapat di akses dari semua pihak, hal ini menjadikan reklame harus diperhatikan pemerintah. Data pajak reklame yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak reklame di kota Makassar.
- b. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerahdari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikatakan PAD sebagai pendapatan dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kota yang dulunya bernama Ujung Pandang lalu berganti menjadi Makassar pada tahun 1999. Makassar kini menjadi Kota metropolitan dan termasuk juga sebagai kota besar di bandingkan kota-kota yang ada di sekitarnya seperti Maros dan Gowa, Kota Makassar juga salah satu tempat yang tepat bagi para pengusaha dan pebisnis untuk memperkenalkan produknya. Kota Makassar di tempati oleh berbagai banyak suku-suku yang ada seperti suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Jawa, Tionghoa dan lain-lain. Kota Makassar terus berkembang dari beberapa tahun terakhir, seperti pembangunan dari segi perekonomian dan infrastruktur seperti adanya pelabuhan laut, Bandara Hasanuddin, jalan tol, dan berbagai industri atau perdagangan yang ada di Makassar, Makassar juga memiliki objek wisata yang cukup menarik seperti pantai Losari, berbagai museum-museum peninggalan Belanda, pantai Akkarena, Tanjung Bayang, dan wisata bahari lainnya juga makam tradisional dan berbagai tarian dan busana tradisional.

2. Visi dan Misi Kota Makassar

1. Visi Kota Makassar

Makassar adalah Kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa, yang berorientasi global, berwawasan lingkungan dan paling bersahabat. Misi Kota Makassar

2. Misi Kota Makassar

- a. Peningkatan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, dan semakin memantapkan persaudaran antara pemeluk agama.
- b. Perwujudan sistem hukum, yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
- c. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- e. Penumbuhkembangkan sinergi pembangunan berkelanjutan antara Kota Makassar dengan daerah lainnya.
- f. Pemanfaatan sumber daya kelautan secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestarian alam lingkungan hidup.
- g. Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- h. Pemantapan sistem dan peningkatan kualitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi.

- i. Peningkatan kompetensi dan daya saing masyarakat, dalam rangka mengemban misi individu atau kelompok.
- j. Pemberdayaan kekuatan ekonomi masyarakat terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
- k. Perwujudan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara layak dan bermartabat, dengan perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar.
- l. Pemanfaatan dan penggalan potensi Sumber Daya Manusia dan potensi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dengan berwawasan global dan berwawasan lingkungan hidup menuju kesejahteraan masyarakat.
- m. Peningkatan dan pemanfaatan pelabuhan sebagai bandar niaga dan menjadikannya sebagai pelayanan transportasi angkutan laut yang berdimensi internasional dan menjadi kebutuhan angkutan laut di Wilayah Indonesia Timur.

3. Kondisi Geografis

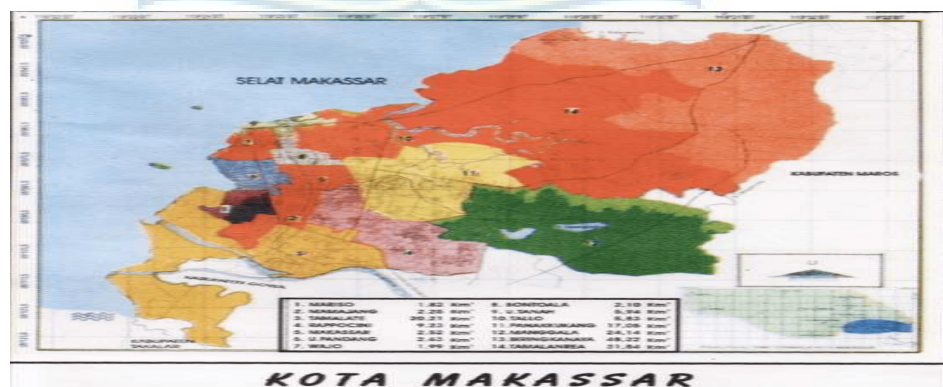
Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17"38" Bujur Timur dan 5°8'6"19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah Selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah Barat adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 3-15°(bergelombang). Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar memiliki kondisi

iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata berkisar antara 26°C sampai dengan 29°C.

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai “Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara dalam kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi ini menyebabkan kota Makassar sering mengalami genangan air pada musim hujan, terutama pada saat turun hujan secara bersamaan dengan naiknya air pasang.

Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 Kecamatan dengan 153 Kelurahan. Ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan Tamalanrea dan Kecamatan Biring

4. Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.



Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Makassar

Jumlah penduduk Kota Makassar Berkisar 1,526,677 juta jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 755.958 dan perempuan sebanyak 770.709.

Peneliti ingin menyajikan tabel jumlah penduduk kota makassar per-kecamatan.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Makassar berdasarkan Jumlah Kecamatan Pada Tahun 2022.

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
Mariso	30.602	29.89
Mamajang	30.129	31.323
Tamalate	102.128	103.413
Rappocini	82.162	87.959
Makassar	42.553	42.962
Ujung Pandang	13.716	15.338
Wajo	15.47	15.983
Bontoala	27.886	29.311
Ujung Tanah	18.037	17.497
Sangkarang	7.239	7.292
Tallo	70.303	70.027
Panakkukang	73.971	75.693
Manggala	75.094	74.393
Biringkanaya	110.138	110.318
Tamalanrea	56.533	59.31
TOTAL	755.968	770.779

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2023.

Jika dilihat dari tabel diatas jumlah penduduk terbanyak di kota makassar ada dikecamatan Biringkanaya Laki-laki sebanyak 110.138 dan perempuan 110.318. sedangkan yang paling sedikit yaitu kecamatan Sangkarang berjumlah Laki-laki 7.239 dan perempuan 7.292. Luas Wilayah Kota Makassar_yaitu sekitar 175.77km² disamping fungsinya sebagai Ibu

Kota Propinsi Sulawesi Selatan juga merupakan daerah pusat pengembangan wilayah bagian timur, karena merupakan pusat pengembangan wilayah, maka di Makassar tentu akan dijumpai berbagai macam, kemudahan-kemudahan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Kemudahan-kemudahan itu antara lain : fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, pembelanjaan, hiburan, bank-bank dan lain-lain.

B. Hasil Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU No.17 Tahun 2003 bahwa pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lain yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Penerimaan tersebut menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan Daerah (basis akrual) adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf (a) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri perlu di berikan sumber- sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata (Nursyam, 2019). Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih

leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayah nya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup (Nursyam, 2019). Bastian (2006), menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan milik negara. Lebih lanjut Halim (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah disetiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemampuan di bidang industry atau memiliki sumberdaya alam yang melimpah cenderung memiliki Pendapatan Asli Daerah jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kota Makassar kaya karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki Pendapatan Asli Daerah yang rendah (Suandi, 2016).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi, laba usaha daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, khususnya pajak daerah diperlukan antara lain suatu kajian dan

perhitungan-perhitungan seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggunakan presentase perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah. Kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar bagian dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumbangan dari pos pajak daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang penerimaan keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 Angka 8 Bahwa "Pendapatan Asli Daerah disebut PAD adalah pendapatan yang di peroleh Daerah yang dipungut berdasarkan aturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan". Pendapatan Asli Daerah PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menandai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar dalam sepuluh tahun terakhir mengalami perubahan yang beragam. Salasatu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, Pendapatran Asli Daerah yaitu hasil pajak, retribusi daerah pendapatan dari Dinas-dinas, BUMN, dan lain-lain yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah

Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut ini data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. h mencerminkan tingkat kemandirian daerah.

Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar 2010-2019

NO	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Persentase (%)
1	2010	34,842,143,749,72	-
2	2011	33,780,847,477,28	-3,04
3	2012	52,347,658,040,42	54,96
4	2013	85,874,602,728,88	64,04
5	2014	155,427,196,665,98	80,99
6	2015	159,777,772,085,62	2,79
7	2016	180,156,598,90	-99,88
8	2017	280,478,099,49	55,68
9	2018	214,246,216,58	-23,61
10	2019	230,462,002,38	7,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2023

Berdasarkan label 4.2 di atas, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yakni tahun 2010 sampai tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar mengalami fluktuatif tiap tahunnya, dimana Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2010 sebesar 34,842.143,749,72 pada tahun 2011

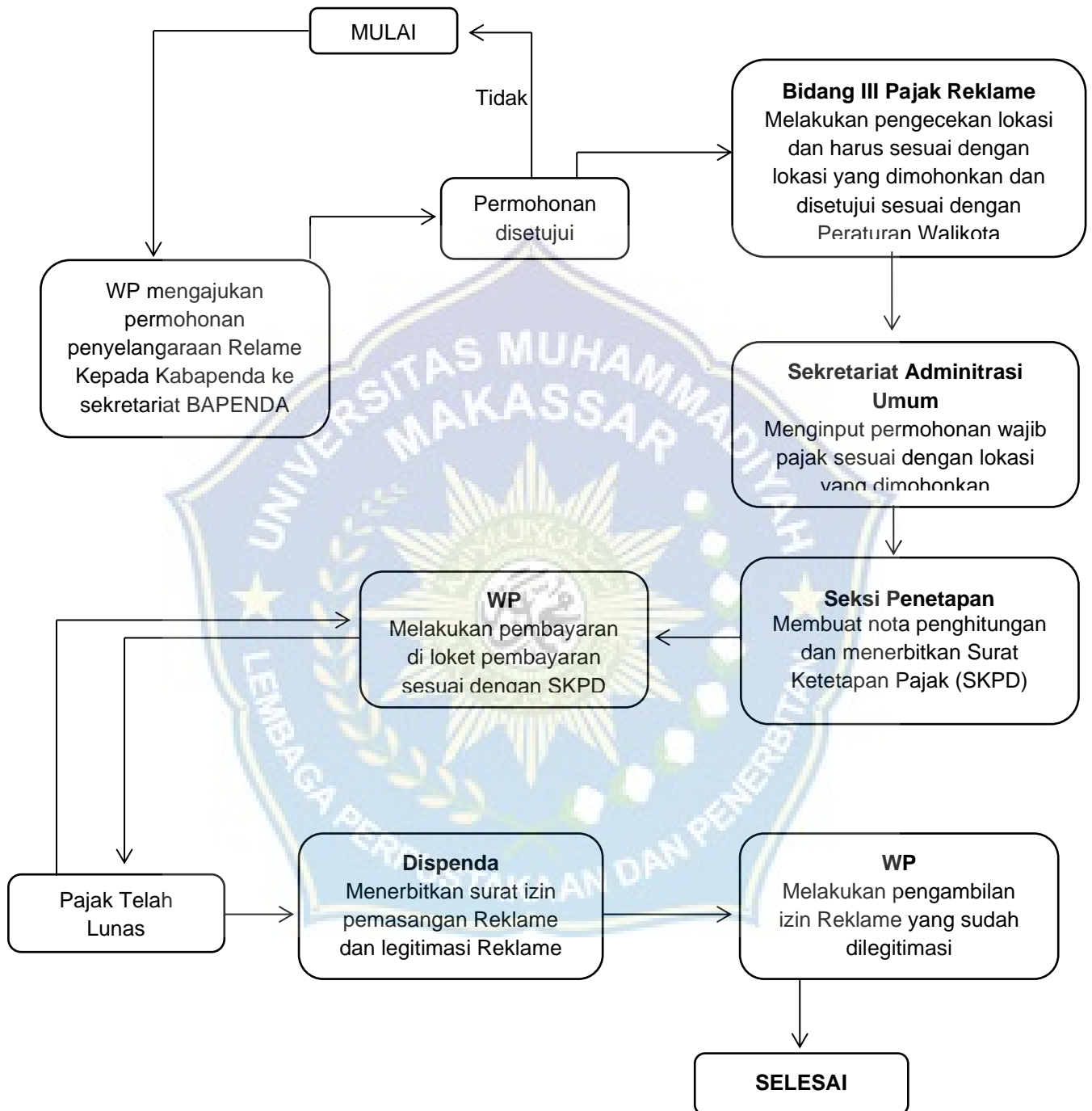
sebesar 33,780,847 477 28, pada tahun 2012 sebesar 52.347,658,040.42 pada tahun 2013 sebesar 85,874,602.726,58, pada tahun 2014 sebesar 155,427,196,665,98, pada tahun 2015 sebesar 159.777.772.085.62 pada tahun 2016 sebesar 180,156,595.90, pada tahun 2017 sebesar 280,478.099/49, pada tahun 2015 sebesar 214.246 216.58 dan pada tahun 2019 sebesar 230,462,002.38

2. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Jika tidak membayar pajak reklame, siap-siap saja baliho atau spanduk Anda akan diturunkan.

Pajak reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Dalam Perda tersebut dijelaskan, pajak reklame adalah pungutan yang dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Kita biasanya mengidentikkan reklame dengan media periklanan besar yang ditempatkan pada area yang sering dilewati masyarakat umum seperti sisi jalan raya. Reklame umumnya berisi informasi dengan ilustrasi yang besar dan menarik.

Adapun Alur dalam pelayanan pajak reklame dapat dilihat sebagai berikut :



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Tahun 2023

Gambar 4.2 Alur Pelayanan Pajak Reklame

Berdasarkan gambar diatas alur pelayanan Pajak reklame dimulai dengan mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame kepada Kabupaten ke sekretariat BAPENDA. Setelah permohonan disetujui selanjutnya Bidang III melakukan pengecekan lokasi yang dimohonkan dan disetujui sesuai dengan peraturan walikota, jika tidak disetujui maka melakukan pengajuan kembali. Sekretariat administrasi umum, menghimpun permohonan wajib pajak sesuai dengan lokasi yang dimohonkan.

Kemudian seksi penetapan, membuat nota perhitungan dan menerbitkan surat ketetapan pajak (SKPD). selanjutnya, wajib pajak melakukan pembayaran di loket dan membayar sesuai dengan SKPD, yang tidak melunasi pajak, diwajibkan untuk segera mungkin melunasi atau membayar, sehingga badan pendapatan daerah akan menerbitkan surat izin pemasangan reklame dan legalisasi reklame untuk wajib pajak yang telah melunasi/membayar reklame, dan wajib pajak mengambil izin reklame dan reklame yang sudah di legalisasi tersebut.

3. Jenis-jenis Pajak Daerah di Kota Makassar

Berdasarkan data yang di peroleh dan referensi yang ada, bahwa pajak ialah kontribusi yang wajib terhadap negara yang berhutang terhadap orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Adapun jenis-jenis pajak daerah yang di pungut oleh badan pendapatan daerah di Kota Makassar dapat di lihat pada tabel di bawah ini: Dibawah ini adalah tabel target dan realisasi pajak reklame Kota Makassar

**Tabel 4.3. Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Makassar
Tahun 2013-2022**

Tahun	Target	Realisasi
2015	Rp. 21.000.000.000	Rp. 19,682,419,591
2016	Rp. 23.248.645.000	Rp. 19,859,383,752
2017	Rp. 24.748.645.000	Rp. 19,080,173,516
2018	Rp. 25.590.346.000	Rp. 18,354,864,487
2019	Rp. 26.000.000.000	Rp. 39, 282,116,126
2020	Rp. 35.000.000.000	Rp. 44.880.644.293
2021	Rp. 53.000.000.000	Rp. 53.641.688.525
2022	Rp. 41.000.000.000	Rp. 46.606.813.357

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2023

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar menunjukkan bahwa setiap tahun pajak reklame di kota makassar terus meningkat mulai dari tahun 2013 hingga 2022, pelonjakan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2016 Rp. 18,354,864,487 pada tahun tahun 2017 meningkat senilai Rp. 39, 282,116,126 meningkat sekitar 18% ini adalah pelonjakan yang sangat signifikan. Seiring berjalannya waktu dari tahun ke tahun terus meningkat maka Pajak Reklame berpotensi meningkatkan PAD Kota Makassar, pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sekitar 7,3% pada tahun 2018 meningkat 2,3% Rp. 44.880.644.293. 2019 meningkat menjadi Rp. 53.000.000.000 pencapai 16%. 2020 turun menjadi Rp. 46.606.813.357, pencapaian -15%. 2020 menjadi tahun yang mengalami penurunan yang drastis, ada banyak faktor yang mempengaruhi turunnya realisasi salah satunya ditididakannya event besar, larangan kumpul-kumpul dan lain-lain yang menyangkut masalah event.

Dibawah ini adalah tabel persentase kontribusi jenis-jenis pajak daerah kota makassar

Tabel 4.4 Persentase Kontribusi Jenis-jenis Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2018-2022

Jenis-Jenis Pajak	Tahun(%)					Rata-rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Hotel	8,01	9,78	10,93	11,22	6,34	9,26
Pajak Restoran	13,07	14,83	17,55	19,60	15,71	16,15
Pajak Hiburan	3,09	3,32	4,06	3,74	1,66	3,02
Pajak Reklame	3,54	4,47	4,47	4,99	5,36	4,37
Pajak Penerangan Jalan	19,14	20,40	22,38	21,43	25,29	21,72
Pajak Mineral	0,05	0,01	-	-	-	0,03
Pajak Parkir	1,73	1,73	1,78	1,87	1,14	1,65
Pajak Air Bawah Tanah	0,09	0,19	0,29	0,36	0,05	0,20
Pajak Sarang Walet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak BPHTB	21,47	28,72	22,20	21,69	23,93	23,60
PBB Sektor P2	17,53	15,42	15,56	15,24	19,52	16,65

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (olah data), Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, Bahwa jenis-jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar belum ada yang cukup baik dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Jenis pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) yaitu dengan rata-rata 23,60% dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dimana kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 28,72%. Jenis pajak daerah yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah adalah pajak sarang burung walet, Pajak mineral dengan rata-rata 0,03%, juga pajak reklame dengan rata-rata hanya sebesar 4,37% saja dari tahun 2016 sampai dengan 2022, tentunya ini berbanding terbalik dengan anggapan bahwa makassar merupakan pusat kota di mana laju pertumbuhan ekonominya yang lebih maju jika di bandingkan dengan kota-kota di sekitarnya seperti maros dan gowa, juga banyaknya industri-industri yang ada dan pusat-pusat perbelanjaan. Tentunya dengan melihat keadaan ini pemerintah khususnya

Badan Pendapatan Daerah masih harus menggali terus potensi-potensi pajak yang ada di kota makassar sehingga pajak daerah terus meningkat dan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk pembangunan kota makassar.

Jika pajak reklame lebih di perhatikan, tidak menutup kemungkinan kalau saja pajak reklame bisa menjadi salah satu pajak andalan dalam memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah jika di bandingkan dengan pajak lainnya karena mengingat kota makassar merupakan pusat ibu kota sulawesi selatan yang menjadi pusat bisnis dan menjadi daya tarik bagi para pengusaha untuk memperkenalkan produknya untuk tujuan komersil. Dengan meningkatnya pajak reklame tentunya ini bisa membantu dalam membiayai segala bentuk pembangunan dan membiaya segala kegiatan pemerintah melalui Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar

4. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Kota Makassar

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat pembuatan media atau yang menurut bentuk dan corak ragamnya bertujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum pada suatu barang jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Pendapatan asli daerah (PAD) ialah sumber pendapatan daerah yang berasal dari segala kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. Secara umum dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah

Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan mengelola potensi asli daerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan data yang telah di kumpulkan oleh peneliti mengenai perkembangan penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka selanjutnya untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang diterima setiap tahunnya maka digunakan rumus sebagai berikut

Berdasarkan rumus di atas maka besarnya kontribusi yang di terima setiap tahunnya adalah sebagai berikut.

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4.5 Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada Tahun 2013-2022

Tahun	Pajak Reklame	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2015	Rp. 19,682,419,591	Rp. 612,056,765,277	3,21%	Sangat Kurang
2016	Rp. 19,859,383,752	Rp. 655,362,121,024	3,03%	Sangat Kurang
2017	Rp. 19,080,173,516	Rp. 709,962,895,492	2,68%	Sangat Kurang
2018	Rp. 18,354,864,487	Rp. 879,579,142,506	2,08%	Sangat Kurang
2019	Rp. 39,282,116,126	Rp. 858.212.312.270	3,54%	Sangat Kurang
2020	Rp. 44.880.644.293	Rp. 947.371.868.404	4,47%	Sangat Kurang
2021	Rp. 53.641.688.525	Rp. 1.073.061.660,653	4,99%	Sangat Kurang
2022	Rp. 46.606.813.357	Rp. 868.699.900.035	5,36%	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar (data diolah), Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat di simpulkan bahwa kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kota

makassar pada tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi. Selama tahun 2013-2022 kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,36%, Naiknya lainnya seperti: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak BPHTB. Disebabkan adanya pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir dan sangat berdampak pada kontribusi pajak daerah dengan adanya aturan pemerintah pusat PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) dan PPKM (Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat), dan Kota Makassar termasuk dalam pembatasan tersebut, hal ini sangat berdampak pada kontribusi pajak daerah, namun pada pajak reklame terjadi kenaikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Kota Makassar karena PPKM dan PSBB tidak begitu berpengaruh kepada bidang reklame dan pajak reklame. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,08%. Diduga di karenakan semakin berkurangnya peminat konsumen industri untuk memasang reklame di jalan apalagi adanya gambar ataupun selogan pada rokok tentang "Rokok Dapat Membunuhmu" sehingga ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dan juga diakibatkan oleh keluarnya peraturan pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2006 terkait pemasangan reklame yang tidak lagi boleh di lakukan jalan-jalan nasional, sehingga menurut mantan kepala dinas tata ruang dan bangunan (DTRB), banyak reklame yang sudah habis jangka waktunya, tidak lagi diperpanjang oleh Bapenda selain itu reklame sudah terlalu banyak di keluhkan oleh masyarakat karena kota tidak tertata dengan baik dan semakin semrawutnya juga kurangnya kesadaran terhadap membayar pajak. Kurang optimalnya penerimaan pajak reklame di sebabkan juga oleh kurang optimalnya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota

Makassar dalam melakukan pungutan dan Pengolahan Pajak reklame. Salah satunya adalah tertuju pada kurangnya penertiban dan pengawasan yang di lakukan pemerintah setempat, contohnya saja banyaknya reklame yang izinya sudah mati akan tetapi masih tetap terpasang.

Peningkatan PAD yang besar juga menyebabkan kontribusi pajak reklame menurun drastis. Faktor penyebab naiknya PAD dari tahun ke tahun juga di karenakan komponen bagi hasil pajak untuk Pajak BPHTB dan Pajak PBB sektor 2 dan lainnya. Secara rata-rata kontribsi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013-2022 adalah sebesar 2,72%. Menurut kriteria dan indikator yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota makassar harus lebih meningkatkan dan menggali lagi dalam memanfaatkan dan memperhatikan serta mengoptimalkan segala sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan Pajak reklame sehingga pajak Reklame ini akan memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dalam rangka membiayai pembangunan Kota Makassar dimasa yang akan datang, namun berdasarkan tabel di atas kontribusi pajak reklame sebagai pajak daerah masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di kota makassar.

C . Pembahasan

Kota Makassar merupakan kota yang mempunyai laju pertumbuhan sangat tinggi dimana kegiatan perekonomian dan pemerintahan terpusat di kota tersebut. Terpusatnya segala kegiatan di kota makassar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi di kota tersebut yang lebih maju di bandingkan kota-kota yang ada di sekitarnya seperti maros dan gowa hal itu dapat di tunjukkan oleh banyaknya industri dan perdagangan yang ada di kota makassar. Meningkatnya industri dan perdagangan di kota makassar maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kota makassar. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Blakely (1989:44) berpendapat bahwa “kebijakan perpajakan selalu menjadi komponen utama dari kebijakan pembangunan ekonomi” Dalam prakteknya di Indonesia, sector utama yang memberikan kontribusi paling besar terhadap kemampuan keuangan daerah secara umum adalah sector pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian ini memfokuskan pada Pajak reklame sebagai salah satu bagian dari pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dalam Pasal 1 ayat (26) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang,

jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Makassar, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD. Makassar merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangannya perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat di bandingkan daerah sekitarnya. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Makassar dari berbagai sektor khususnya industri dan perdagangan tumbuh begitu pesat, jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat-pusat perbelanjaan yang didirikan di kota Makassar. Dengan melihat perkembangan ini maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai sudut kota Makassar baik di pusat kota maupun pinggiran kota yang banyak terpasang berbagai macam reklame.

Akan tetapi dari data yang telah di tampilkan pada bab sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 19.681.419.591, Tahun 2014 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 0,90% sehingga penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp. 19.859.383.752, kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 3,92% sehingga penerimaan pajak

reklame menjadi Rp. 19.080.173.516, Tahun 2016 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami penurunan sebesar 3,80% sehingga penerimaan pajak reklame pada tahun 2016 adalah Rp. 18.354.864.487. Tahun 2017 realisasi penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan sebesar 114% sehingga penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 39.282.115.126. Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerimaan pajak reklame Selama tahun 2013-2020 kontribusi tertinggi berada pada tahun 2022 yaitu sebesar 5,36%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar 2,08%. Diduga di karenakan semakin berkurangnya peminat konsumen industri untuk memasang reklame di jalan apalagi pada tahun 2019 memasuki pandemi sehingga ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame dan juga diakibatkan oleh keluarnya peraturan pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2006 terkait pemasangan reklame yang tidak lagi boleh di lakukan jalan-jalan nasional, sehingga menurut mantan kepala dinas tata ruang dan bangunan (DTRB), banyak reklame yang sudah habis jangka waktunya, tidak lagi diperpanjang oleh Bapenda selain itu reklame sudah terlalu banyak di keluhkan oleh masyarakat karena kota tidak tertata dengan baik dan semakin semrawut, juga kurangnya kesadaran terhadap membayar pajak. Kurang optimalnya penerimaan pajak reklame di sebabkan juga oleh kurang optimalnya pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam melakukan pungutan dan pengolahan pajak reklame. Salah satunya adalah tertuju pada kurangnya penertiban dan pengawasan yang di lakukan pemerintah setempat,

contohnya saja banyaknya reklame yang izinya sudah mati akan tetapi masih tetap terpasang.

Peningkatan PAD yang besar juga menyebabkan kontribusi pajak reklame menurun drastis. Faktor penyebab naiknya PAD dari tahun ke tahun juga di karenakan komponen bagi hasil pajak untuk Pajak BPHTB dan Pajak PBB sektor 2 dan lainnya. Secara rata-rata kontribusi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama lima tahun terakhir di mulai pada tahun 2013-2020 adalah sebesar 2,72%. Menurut kriteria pada indikator yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat di simpulkan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) masih sangat kurang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kota makassar harus lebih meningkatkan dan menggali lagi dalam memanfaatkan dan memperhatikan serta mengoptimalkan segala sumber-sumber penerimaan yang terkait dengan pajak reklame sehingga pajak Reklame ini akan memberikan potensi penerimaan yang cukup besar dalam rangka membiayai pembangunan Kota Makassar dimasa yang akan datang.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan oleh Penulis terkait Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dapat di simpulkan bahwa:

1. Penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar tahun 2013-2022 daerah Kota Makassar rata-rata sebesar 2,72%
2. Pencapaian penerimaan yang tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 53.641.688.525 dan paling terendah pada tahun 2016 yaitu menurun sebesar -3.80%
3. Persentase kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2013-2022 dapat di katakan masih sangat kurang, yang di akibatkan oleh kurang nya kesadaran terhadap wajib pajak dan atas peraturan pemerintah itu sendiri

B. Saran

Adapun upaya meningkatkan Pajak khususnya mengenai Pajak Reklame, maka penulis mencoba mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Untuk mempercepat proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya-upaya konkrit dan pendataan sumber-sumber pendapatan yang utamanya pajak dan retribusi yang memiliki potensi cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Kepada pemerintah khususnya Badan Pendapatan Daerah kota Makassar dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame agar selalu mencapai target yang efektif sebaiknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara rutin sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam taat membayar pajak.

3. Meningkatkan pengawasan, serta upaya-upaya yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dan bahkan secara dadakan, memperbaiki proses pengawasan, dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan.
4. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang akan membahas dengan topik yang sama untuk memperluas ruang lingkup penelitiannya dan menambah jumlah tahun penerimaan pajak reklame serta menambah variabel lainya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota makassar.



DAFTAR PUSTAKA

- Darwin. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Fitriani. 2012. Kontribusi Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah. Pontianak.
- Fransiscapesik, Vera. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Manado*.
- Keputusan Walikota Makassar. 2009 No.500/423/KEP/IV/2009 tentang Penetapan Perlindungan Nilai Sewa Reklame Kota Makassar: Dinas Pendapatan Kota Makassar.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Daerah. 2010. *Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Makassar*
- Purnama, Wati. 2017. *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari. (diakses pada tahun 2020)*
- Rachmat, Putranto M. 2018. *Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar*. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Runtini, Ike. 2017. *Efektifitas Pajak Parkir dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri 2014-2016*.
- S, M Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Samudra, Aziz Azhari. 2016. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*.
- Soemitro, Rochmat. 2003. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT Fresco
- Suandy. 2008. *Perpajakan, Salemba Empat, Yogyakarta*.

Sulistiingsih, dan Farida Idayat. 2013. *Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. (diakses pada tahun2020)*

Utomo, Hindarto Prasetyo. 2006. *Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.Kudus. Universitas Negeri Semarang*

Winda, Rufiana Dewi. 2016. *Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Perpajakan. Malang. UniversitasBrawijaya*



L

A

M

P

I

R

A



N

Lampiran 1

Target dan Realisasi Pajak Reklame, Pajak Daerah dan PAD Kota Makassar Tahun 2017-2022

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH APBD 2017			
NO	NAMASKPO	TARGET PERUBAHAN 2017	REALISASI PERUBAHAN 2017
Dinas Pendapatan Daerah			
A. Hasil Pajak Daerah			
1.	Pajak Hotel	1.081.111.140,00	949.677.794,16
2.	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	938.796.084,12
3.	Pajak Hiburan	140.000.000,00	92.970.095,18
4.	Pajak Reklame	170.000.000,00	140.967.957,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	40.000.000,00	31.820.486,75
6.	Pajak Reklame	36.000.000,00	43.893.930,97
7.	Pajak Parkir	106.996.580,00	109.822.055,92
8.	Pajak Air Bawah Tanah	3.440.000,00	30.194.897,00
9.	Pajak Sarang Burung Walet	500.000,00	98.634.539,00
10.	Pajak BPHTB	27.000.000,00	16.495.495,77
11.	PBB Sektor P2	27.000.000,00	1.800.000,00
12.	Pajak BPHTB	50.000.000,00	38.211.011,00
13.	PBB Sektor P2	367.885.410,00	371.159.940,00
14.	PBB Sektor P2	499.000.000,00	346.511.990,40
15.	PBB Sektor P2	22.897.490,00	104.495.240,00
16.	Retribusi Jasa Usaha	22.897.490,00	10.881.300,00
B. Hasil Retribusi Daerah			
1.	Pengg. Tanah untuk Reklame	-	-
2.	Ret. Penawaran Titik Reklame	-	-
C. Dana Perimbangan			
1.	Bagi Hasil dari PBB	-	-
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-
TOTAL PENDAPATAN 2017		1.086.111.140,00	949.677.794,16

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH APBD 2018			
NO	NAMASKPO	TARGET PERUBAHAN 2018	REALISASI PERUBAHAN 2018
Dinas Pendapatan Daerah			
A. Hasil Pajak Daerah			
1.	Pajak Hotel	1.184.713.148,00	947.371.868,40
2.	Pajak Restoran	1.355.995.478,00	942.551.891,96
3.	Pajak Hiburan	130.000.000,00	103.142.302,58
4.	Pajak Reklame	156.000.000,00	146.286.919,52
5.	Pajak Penerangan Jalan	30.000.000,00	44.380.644,29
6.	Pajak Reklame	30.000.000,00	38.710.026,74
7.	Pajak Parkir	110.000.000,00	113.000.000,00
8.	Pajak Air Bawah Tanah	3.000.000,00	31.927.812,20
9.	Pajak Sarang Burung Walet	4.000.000,00	2.783.820,56
10.	Pajak BPHTB	100.000,00	47.026,00
11.	PBB Sektor P2	300.000.000,00	210.340.974,16
12.	PBB Sektor P2	155.000.000,00	147.431.840,65
13.	PBB Sektor P2	155.000.000,00	147.431.840,65
14.	PBB Sektor P2	38.761.670,00	4.419.976,44
15.	PBB Sektor P2	38.761.670,00	4.419.976,44
B. Hasil Retribusi Daerah			
1.	Pengg. Tanah untuk Reklame	-	-
2.	Ret. Penawaran Titik Reklame	-	-
C. Dana Perimbangan			
1.	Bagi Hasil dari PBB	-	-
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-
TOTAL PENDAPATAN 2018		1.104.759.140,00	947.371.868,40

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH APBD 2019			
NO	NAMASKPO	TARGET PERUBAHAN 2019	REALISASI PERUBAHAN 2019
Badan Pendapatan Daerah			
A. Hasil Pajak Daerah			
1.	Pajak Hotel	1.315.000.000,00	1.067.323.635,89
2.	Pajak Restoran	1.350.000.000,00	1.204.484.485,18
3.	Pajak Hiburan	385.000.000,00	210.393.159,48
4.	Pajak Reklame	776.000.000,00	402.277.617,80
5.	Pajak Penerangan Jalan	250.000.000,00	53.641.688,55
6.	Pajak Reklame	250.000.000,00	222.267.787,09
7.	Pajak Parkir	2.000.000.000,00	-
8.	Pajak Air Bawah Tanah	60.750.000,00	23.979.510,11
9.	Pajak Sarang Burung Walet	7.000.000,00	3.873.728,07
10.	Pajak BPHTB	250.000,00	93.718,40
11.	PBB Sektor P2	330.000.000,00	232.812.018,72
12.	PBB Sektor P2	215.000.000,00	163.576.273,98
B. Hasil Retribusi Daerah			
1.	Pengg. Tanah untuk Reklame	25.000.000,00	5.738.624,82
2.	Ret. Penawaran Titik Reklame	25.000.000,00	5.738.624,82
C. Dana Perimbangan			
1.	Bagi Hasil dari PBB	-	-
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-
TOTAL PENDAPATAN 2019		1.340.000.000,00	1.073.061.660,63

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DINAS PENDAPATAN DAERAH APBD 2020				
NO	NAMASKPO	TARGET PERUBAHAN 2020	*REALISASI S/D BULAN DESEMBER 2020	% CAPAIAN DARI TARGET PERUBAHAN 2020
Badan Pendapatan Daerah				
A. Hasil Pajak Daerah				
1.	Pajak Hotel	850.672.543,76	868.699.900,03	102,12
2.	Pajak Restoran	846.699.298,87	864.313.239,51	102,08
3.	Pajak Hiburan	111.637.986,37	136.496.439,78	122,27
4.	Pajak Reklame	30.000.000,00	14.435.494,76	48,12
5.	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000,00	46.606.813,35	113,68
6.	Pajak Reklame	209.000.000,00	219.727.194,49	105,13
7.	Pajak Parkir	-	-	-
8.	Pajak Air Bawah Tanah	11.000.000,00	9.962.069,18	90,56
9.	Pajak Sarang Burung Walet	3.036.312,49	4.428.233,19	145,84
10.	Pajak BPHTB	25.000.000,00	28.539.800	114,16
11.	PBB Sektor P2	205.000.000,00	207.950.696,89	101,44
12.	PBB Sektor P2	164.000.000,00	169.595.405,14	103,41
B. Hasil Retribusi Daerah				
1.	Pengg. Tanah untuk Reklame	3.973.244,89	4.386.660,52	110,40
2.	Ret. Penawaran Titik Reklame	3.973.244,89	4.386.660,52	110,40
C. Dana Perimbangan				
1.	Bagi Hasil dari PBB	-	-	-
2.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	-	-	-
TOTAL PENDAPATAN 2020		850.672.543,76	868.699.900,03	102,12

Lampiran 2

Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame

Berdasarkan PERWALINomor 40 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah,
- PERWALI Kota Makassar Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Reklame

3. TARIF PAJAK REKLAME PERMANEN

PERHITUNGAN REKLAME

RUMUS PERHITUNGAN REKLAME PERMANEN :
= $\{(P \times L \times NJOPR) + NSNS (LO+SP+KT)\} \times 25\%$

CONTOH Perhitungan Reklame Permanen Billboard:
 Perusahaan A mempunyai reklame dengan panjang 10 meter dan lebar 5 meter dengan ketinggian 10 meter terletak di jalan Urip Sumoharjo dengan sudut pandang 1 sisi. Berapa Pajak yang harus dibayar :

Panjang	=	10 meter
Lebar	=	5 meter
Tinggi	=	10 meter
Sudut Pandang	=	1 sisi
Kelas Jalan	=	A
Perhitungan	=	$\{(P \times L \times NJOPR) + NSNS (LO + SP + KT)\} \times 25\%$
Pajak Reklame	=	$\{10 \times 5 \times 2.750.000 + 14.500.000 \times (6 + 0,3 + 2)\} \times 25\%$
Pajak Reklame	=	$50 \times 2.750.000 + 14.500.000 \times (6 + 0,3 + 2) \times 25\%$
Pajak Reklame	=	$\{137.500.000 + 120.350.000\} \times 25\%$
Pajak Reklame	=	$257.850.000 \times 25\%$
Pajak Reklame	=	64.462.500,-

Keterangan :

P	: Panjang
L	: Lebar
NJOPR	: Nilai Jual Objek Pajak Reklame
NS	: Nilai Strategis
LO	: Lokasi
SP	: Sudut Pandang
KT	: Ketinggian
NSNS	: Nilai Satuan Nilai Strategis

Lampiran 3

Surat Keterangan Izin Penelitian


PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JLN. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. 453101 FAX. 424353
 MAKASSAR


 Management System
 ID 9001.2015
 www.bpd.com

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 2630 /BAPENDA / 074 / IX / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : **A. FADLI ABU**

NIM / Jurusan : **105711105716 / Ekonomi Pembangunan**

Pekerjaan : **Mahasiswa (S1) UNISMUH**

Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar**

Judul : **" KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR "**

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka Penyusunan Karya Tulis Ilmiah sesuai judul yang telah ditetapkan. Terhitung sejak tanggal **27 Januari s/d 27 Februari 2023** pada Kantor Badan Pendapatan Kota Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 Februari 2023

An. KEPALA BADAN
 KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN,

ANSAR ZAINAL ABIDIN, SE.,MM
 Pangkat: Pembina
 NIP. 19640515 199103 1 012

LEMBAGA PERPUSTAKAAN

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UNISMUH Makassar di Makassar;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.-



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 13112/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.

Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA MAKASSAR

Di -
MAKASSAR

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 845/05/C.4-VIII/III/1444/2023 tanggal 27 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa peneliti dibawah ini:

Nama : A. FADLI ABU
Nomor Pokok : 105711105716
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Sultan Aiauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**"KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari: Tgl. **27 Januari s/d 27 Februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 27 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal*.

Lampiran 4**DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

1. Bagaimanakah proses Pelayanan pajak reklame ?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak reklame ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame?



Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Plagiasi


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : A.fadli abu
 NIM : 1057114015716
 Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 Dengan nilai :

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	6 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Agustus 2023
Mengetahui
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

 Nursinah, S.H., S.P.
 NBM. 907.291


Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, Fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail: perpustakaan@unismuh.ac.id

A.fadli Abu 1057111015716 BAB I

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX 9% INTERNET SOURCES 0% PUBLICATIONS 0% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unl.ac.id Internet source	3%
2	text-id.123dok.com Internet source	3%
3	rinastkip.wordpress.com Internet source	3%

Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



A.fadli Abu 1057111015716 BAB III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX
10% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
0% STUDENT PAPERS

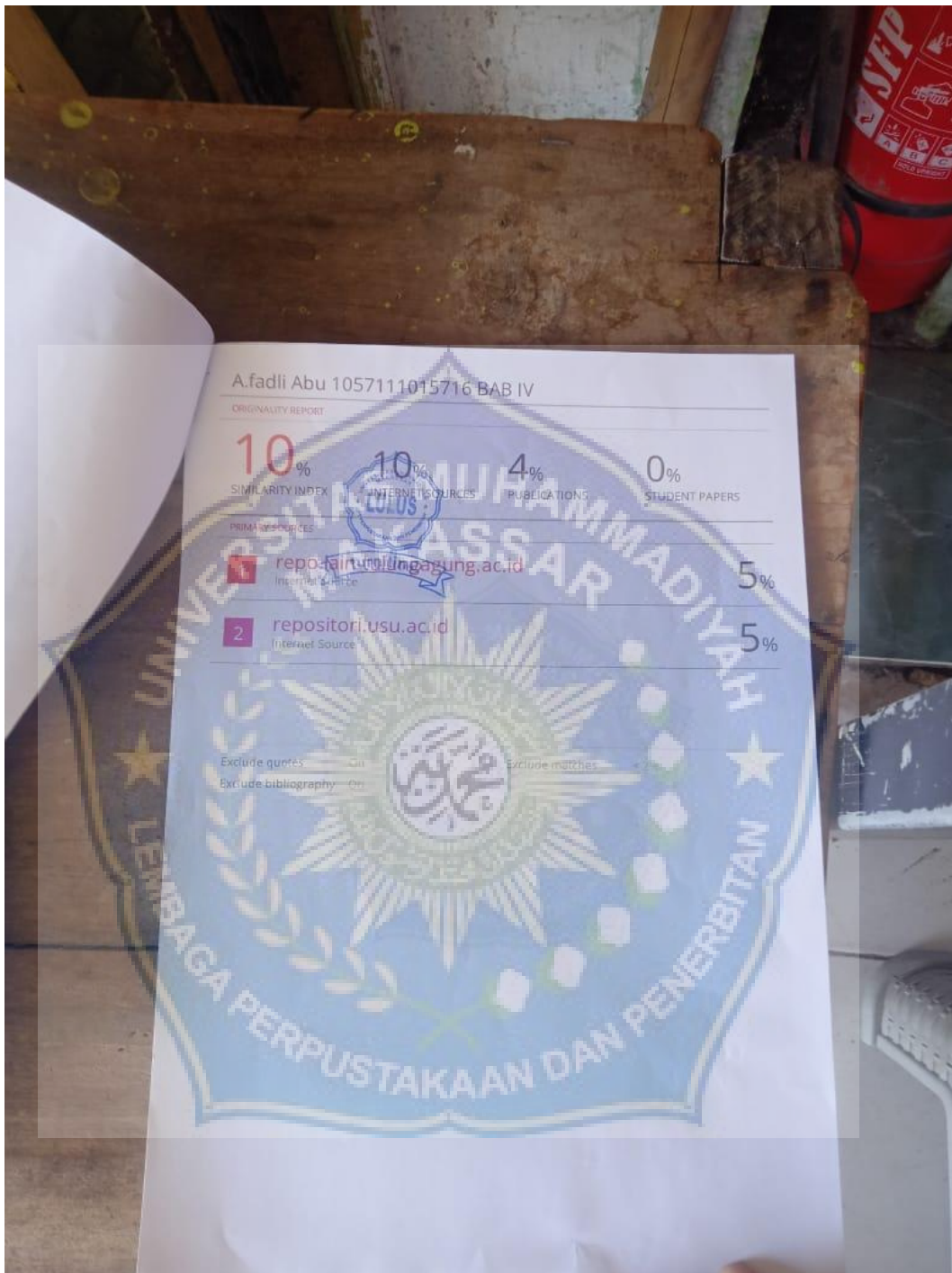


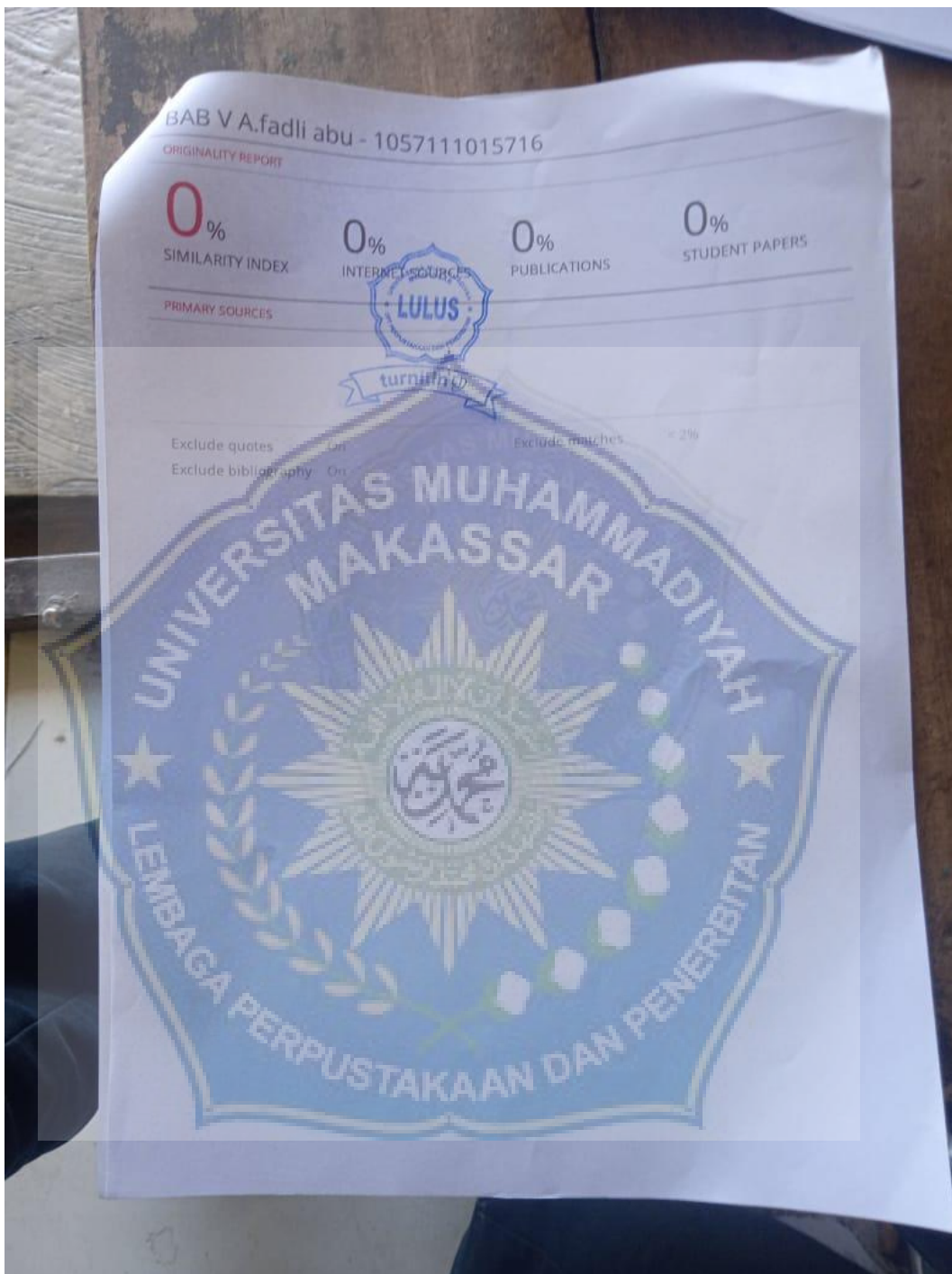
PRIMARY SOURCES

- 1 www.coursehero.com 4%
Internet Source
- 2 adoc.pub 3%
Internet Source
- 3 www.scilit.net 3%
Internet Source



Exclude quotes Exclude matches
Exclude bibliography On





BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama A.FADLI ABU, atau sapaan akrabnya A.Fadli abu Penulis dilahirkan di Kabupaten Bone, tepatnya di Desa Liliriawang, Kecamatan Bengo pada tanggal 30 Maret 1998, merupakan anak ke 3 dari 4 bersaudara dari pasangan ayahanda andi abu baedah dan Ibunda Andi Junaedah. Peneliti menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar, di SDN Karamasa di Kecamatan Bengo pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 lappariaja, Kab. Bengo dan tamat pada tahun 2013 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Lappariaja, Kab. Bengo pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2016 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Ekonomi Pembangunan.